

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL JOKO WIDODO MENUJU DINAMIKA MASA DEPAN PERTUMBUHAN JAKARTA

A.A. Banyu Perwita¹, dan Hendra Manurung

Program Studi Hubungan Internasional, FIKOM – President University
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi – 17550
Telp. 021 89109762

Abstract

Many people argued that the strength of Jokowi's leadership style was not on his technocracy skills but on his transparency, openness and his inspiring power to the society. In the context on leadership theory, Jokowi can be categorized as an inspiring leader who is able to "giving" gift from the hearts that breath the spirit into the people minds". The leadership style of Jokowi should become the model and the commitment for us to further step more progressively. As the governor of DKI Jakarta, Jokowi can be perceived as a leader who has strong and good willingness in empowering the society to further support the vision of Indonesia to become a welfare state.

Key Words: *leadership, value of openness, inspiring people, exemplary*

PENDAHULUAN

Joko Widodo (Jokowi) memiliki ciri menonjol dalam kepemimpinan transformasional, diversitas, fokus kepada warga, komunikasi dan kerja sama, kepekaan global, dan pengambilan risiko. Itu semua ditampilkannya ketika memimpin Solo. Kemampuan Joko Widodo (Jokowi) yang selalu mendorong bawahan mencapai kinerja yang terbaik, tetapi kurang memberi rangsangan intelektual (Gatra, Sandro, 2012). Joko Widodo (Jokowi) sendiri tidak mau terlalu mengandalkan teori dan konsep di atas kertas. Joko Widodo (Jokowi) memilih mencermati persoalan di lapangan, terjun langsung berdiskusi dengan berbagai kelompok masyarakat tanpa mengindahkan stratifikasi sosial, dan cepat memberikan solusi penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat (Adidharta, Syaifud, 2012). Dengan segudang pengalaman memimpin Kota Solo dan menjadi pengusaha berskala ekspor, Joko Widodo (Jokowi) menantang kemampuan dan keahliannya untuk memimpin di ibukota Negara, Jakarta.

¹ Kontak Person : **AA. Banyu Perwita**
Prodi Hubungan Internasional
FIKOM President University
Telp. 021 89109762

PEMBAHASAN

Kepemimpinan transformasional

Karakter dan ciri kepemimpinan transformasional yang menonjol pada Joko Widodo (Jokowi) adalah kemampuan mengenali dan mengartikulasikan visi. Pemimpin wilayah provinsi DKI Jakarta ini bisa membumikan gagasan-gagasan perbaikan menjadi langkah-langkah praktis yang operasional sehingga memudahkan bawahan untuk menjalankannya. Reformasi pelayanan KTP dan Sistem Perizinan Terpadu yang dijalankannya mengindikasikan kemampuan kepemimpinannya. Ia mengubah birokrasi rumit tidak efektif menjadi prosedur sederhana (Adidharta, Syaifud, 2012). Kemampuan ini dapat menjadi modalnya mengubah birokrasi di Jakarta. Kepemimpinan transformasional Jokowi mampu memberi inspirasi kepada anak buah dan para birokrat untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan manusiawi. Relokasi para pedagang kaki lima (PKL) di Solo Jawa Tengah tanpa kekerasan, dan penataan pasar tradisional menjadi contoh dari kemampuannya menyelesaikan masalah yang menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak terkait.

Dalam era globalisasi yang dicirikan dengan semakin meleburnya batas-batas tradisional sebuah negara, proses domestifikasi (*domestication*) dan

internasionalisasi (*internationalisation*) akan semakin mewarnai manajemen pemerintahan (Perwita Banyu AA, 2013). Salah satu dampak yang akan kita alami dari persoalan di atas adalah tuntutan bagi pengaturan-pengaturan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional terhadap berbagai isu-isu nasional dan internasional. Ketidakmauan dan ketidakmampuan kita dalam mengatur semua persoalan pembangunan nasional secara profesional hanya akan mengundang intervensi dari lingkungan internasional baik yang berasal dari aktor negara dan non-negara lainnya. Hal ini, misalnya terlihat dari beragam persoalan pembangunan, khususnya mengenai pengelolaan sumber daya alam nasional. Paling tidak, terdapat tiga poin penting yang terkait dengan aktor dalam manajemen birokrasi kita. *Pertama*, aktor negara merupakan aktor terpenting dalam pengelolaan administrasi dan birokrasi. *Kedua*, aktor berikutnya yang juga dapat memainkan peranan penting adalah aktor intergovernmental spesifik seperti World Bank, IMF dan sebagainya. Aktor *ketiga* adalah aktor multinasional lainnya seperti berbagai perusahaan multinasional. Dari uraian di atas, terdapat paling tidak dua konsekuensi yang patut diketahui dan dipahami dalam pengembangan administrasi internasional.

Konsekuensi pertama bersifat pragmatis, yaitu keharusan terhadap pemahaman administrasi internasional dan birokrasi di atas untuk mengetahui dan memahami "*relational state model*". Di satu sisi, model ini mengharuskan pemahaman terhadap kebutuhan pola kerjasama dan koordinasi antar lembaga maupun institusi birokrasi negara. Di sisi lain, model ini juga mengacu pada pola-pola interaksi antar aktor negara dan aktor non-negara dalam menyediakan kebijakan dan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini, istilah yang kerap juga digunakan untuk menerangkan pola interaksi antara aktor negara dan non negara adalah 'hubungan informal antara administrasi internasional dan birokrasi'. Konsep ini merujuk pada pengaturan dan pengelolaan administrasi dan birokrasi yang melibatkan aktor domestik dan internasional secara lebih fleksibel, tidak terlalu mengikat dalam berbagai isu non politik kenegaraan.

Pada titik ini, tuntutan terhadap totalitas kompetensi terhadap administrasi internasional dan birokrasi dalam era globalisasi ini semakin meningkat tajam. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada tingkat efektifitas yang dapat diperankan seorang pemimpin dalam berbagai isu

lokal, nasional dan global. Selain itu, kompetensi administrasi ini juga akan terkait dengan kualitas "*good public governance*", yang memiliki delapan (8) karakteristik, yaitu: partisipatory, konsensus, akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien, kesetaraan (*equitable*) dan mentaati aturan hukum. Sebaliknya, kurangnya dan atau bahkan ketiadaan kompetensi mesin birokrasi hanya akan menghasilkan tiga jenis "*malgovernance*", yaitu *bad governance*, *weak governance* dan *underdeveloped global governance*. Ketiga *malgovernance* ini yang juga dicirikan dengan kepemimpinan nasional yang lemah dan tidak tegas hanya akan menghasilkan beragam persoalan multidimensi baik dalam tataran lokal, nasional dan internasional. Berbagai hal inilah yang kini sedang Indonesia hadapi dalam pengelolaan pembangunan nasionalnya.

Sementara itu, dalam konteks manajemen pembangunan nasional, berbagai elemen masyarakat baik yang terlibat dalam pemerintahan dan non-pemerintahan (masyarakat bisnis, kampus dan masyarakat sipil lainnya) juga patut memperhatikan berbagai elemen yang sudah dijelaskan di atas agar kita dapat melakukan administrasi, pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan publik dari setiap agenda pembangunan nasional secara lebih baik lagi di masa mendatang.

Kepemimpinan nasional yang tegas, kuat dan berwibawa juga sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan administrasi dan birokrasi di Indonesia. Kegagalan kepemimpinan nasional dan pemerintah dalam menangani hal ini hanya akan semakin menurunkan kualitas manajemen birokrasi kita yang pada akhirnya akan berdampak pula pada kualitas pembangunan nasional yang kita harapkan. Meskipun memakan waktu, ia dapat membangun kepercayaan publik dan mengajak masyarakat berpartisipasi. Kepercayaan, komitmen kuat, ketegasan, kegigihan mendorong partisipasi adalah jurus-jurus kunci kepemimpinannya. Ia memimpin dengan melakukan ketimbang hanya mengatakan. Ia mengedepankan kesederhanaan dan menolak suap.

Kualitas kepemimpinan Jokowi kian menggema dengan kepeduliannya mempraktikkan kemajemukan secara nyata. Ia meyakini bahwa perpaduan beragam orang berbeda di Indonesia akan menyatukan, menggerakkan, dan mengaktualisasi potensi positif warga Jakarta. Rekam jeaknya ketika memimpin Solo menunjukkan bahwa ia memahami makna

kepemimpinan yang menempatkan perbedaan kelamin bukan sebagai problem, tetapi solusi. Salah satunya, ia mengangkat perempuan sebagai kepala satpol pamong praja. Ia terbuka pada beragam budaya, bahkan menjadikannya sebagai keunggulan. Di tengah pertentangan antara tradisi dan kemajuan, ia memanfaatkan budaya justru untuk memajukan masyarakat. Solo sekarang dikenal sebagai jantung budaya Jawa, "*Spirit of Java*", bukan lagi dikenal sebagai sumbu pendek yang gampang ricuh-rusuh. Ia juga memfasilitasi festival musik cadas berskala internasional.

Selain itu Jokowi punya apresiasi tinggi terhadap keragaman dan keunikan. Besar kemungkinan dengan menjadi Gubernur Jakarta, ia akan menyelami perbedaan yang ada dan mencari cara untuk menjadikannya sebagai kekuatan. Prinsipnya adalah prinsip pengusaha: "Membangun manajemen produk dan brand, sekaligus melakukan positioning kota dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia atau di dunia".

Saat ini Indonesia sudah tertinggal 20 tahun dalam relisasi MRT (Manurung Hendra, 2012), dimana Indonesia termasuk salah satu negara di ASEAN yang menggagas pertama kali tentang MRT sejak tahun 1990an, terutama bagaimana upaya mengatasi kemacetan parah di wilayah Jabodetabek. Pemerintah daerah DKI Jakarta perlu segera merealisasikan proyek tersebut mengingat makin semrawutnya kemacetan dalam kota Jakarta, dan diperkirakan pada tahun 2018 wilayah sekitar DKI Jakarta mengalami kemacetan total (Manurung Hendra, 2012). Ketika memimpin Solo, Joko Widodo (Jokowi) mampu menggerakkan masyarakat dengan komunikasi terbuka. Hubungan dengan wakil Walikota juga harmonis. Pembagian peran dan delegasi wewenang dan pembagian tugas yang jelas, sangat mendukung efektivitas kepemimpinannya. Gaya komunikasinya membuat anak buah memiliki komitmen mencapai tujuan organisasi. Cara kerjanya yang menekankan rasa percaya sangat menonjol memengaruhi kinerja anak buah. Anak buahnya pun terdorong menjadi anggota yang aktif dan bersemangat mencapai tujuan. Keberpihakan Joko Widodo (Jokowi) kepada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat di Solo membangun solidaritas kelompok masyarakat asal Jawa Tengah di Jakarta, terutama kalangan status ekonomi menengah ke bawah.

Birokrasi merupakan kunci utama untuk melaksanakan sebuah sistem pemerintahan. Tanpa

birokrasi, tentu segala kebijakan yang dibuat oleh elit politik atau pejabat akan mengalami kendala atau bahkan tidak dapat tereksekusi. Birokrasi secara umum dapat didefinisikan sebagai mesin penggerak sebuah kebijakan. Artinya, segala kebijakan yang dibuat oleh elit politik akan dieksekusi atau dijalankan melalui birokrasi. Selain itu, birokrasi bisa dikatakan sebagai organ pelaksana dari sebuah kebijakan. Misalnya saja, ketika seorang elit politik membuat kebijakan mengenai layanan kesehatan gratis untuk masyarakat, maka birokrasi juga akan melaksanakan hal yang sama sesuai perintah elit politik tersebut.

Selain itu, birokrasi juga dapat dilihat sebagai struktur organisasional. Menurut Max Weber, birokrasi mempunyai ciri-ciri organisasional tertentu yang dilihat dari prosedur pengangkatannya. Selain itu, Weber juga melihat bahwa birokrasi merupakan badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Artinya, Weber melihat sebuah birokrasi sama halnya dengan struktur organisasi. Apabila mengambil contoh organisasi, maka akan terlihat struktur-struktur yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu.

Menurut penulis, eksistensi Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai ide cemerlang berusaha untuk membangun Jakarta yang lebih baik, bersama semua elemen masyarakat, sehingga pencitraan Jakarta tidak membuat ibu kota Negara ini eksklusif dan tidak manusiawi. Tampilannya yang sederhana membuat ia terasa dekat dan tidak berjarak dengan masyarakat. Gaya komunikasi yang ia tunjukkan ini sangat efektif menimbulkan antusiasme di kalangan masyarakat umum. Ia juga tidak segan mendatangi dan membujuk pihak lain untuk dapat membantunya mendapatkan nilai positif bagi pembangunan kota Jakarta.

Kepedulian dan Kerja Nyata Pemimpin

Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang sangat mengerti dan mengutamakan warga yang dipimpinnya. Baginya, pemimpin tidak boleh punya kepentingan, selain mengutamakan warga. Keberhasilannya di Solo menunjukkan fokus pada kebutuhan warga.

Perhatian yang besar terhadap kesejahteraan orang kecil menonjol padanya. Di Jakarta, masalah yang terkait dengan orang kecil, selain pendidikan dan kesehatan, adalah tempat tinggal yang tidak memadai. Program kesehatan adalah prioritas Joko Widodo (Jokowi), lalu pelayanan publik dan solusi kemacetan (Agus Pramusinto, Erwan Agus

Purwanto, 2009). Orientasinya yang fokus kepada warga juga ditunjukkan dari niatnya membangun ruang terbuka publik yang bisa diakses tanpa biaya, seperti pantai terbuka yang dikelola dengan mekanisme badan layanan umum.

Kepekaan global, inovasi, dan pengambilan risiko

Kepekaan global terbentuk saat Jokowi menjadi eksportir mebel. Pengalamannya mengunjungi kota besar dunia memberinya inspirasi tentang kota teratur, tertib, dan nyaman. Ia lalu membuat “city wal” di ruas-ruas jalan raya Kota Solo, memberikan hak kepada pejalan kaki agar menikmati kota. Selain menata pasar tradisional dan relokasi PKL, sistem transportasi kota ditata dengan sistem railbus yang beroperasi di dalam kota dan diproyeksikan terkoneksi dengan kota-kota terdekat. Ia juga menerapkan Sistem Terpadu Tiket Transportasi sehingga pengguna transportasi umum dimudahkan dengan moda transportasi yang saling terhubung, juga menerapkan “*student card*” untuk mendidik pelajar menggunakan transportasi umum.

Uniknya, kepekaan global ini ia cirikan dengan identitas dan karakter lokal. Ia tegaskan Solo sebagai kota budaya, dengan memanfaatkan kereta api kuno sebagai ikon pariwisata kota, menjadikan aksara Jawa sebagai media informasi pada papan nama kantor pemerintahan, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Ia juga perintahkan penggunaan seragam dengan busana tradisional Jawa, bukan hanya batik.

Kemampuan inovasinya tinggi. Joko Widodo (Jokowi) mampu menghasilkan ide baru dan berharga serta menggunakan ide itu untuk meningkatkan pelayanan baru yang lebih baik. Ia juga berani mengambil risiko. Ia berani dicemooh ketika memasang pelat nomor AD 1 di mobil Esemka. Ia berbeda pendapat dengan atasan, Gubernur Jawa Tengah secara terbuka dalam kasus Pabrik Es Sari Petojo, dan sekarang ia mengambil risiko maju sebagai calon gubernur DKI. Di Solo jelas lebih nyaman, baginya. Sindiran para ahli kebijakan publik, tata kota, pemerintahan, dan ilmu politik yang mencibirnya karena ia dianggap menyederhanakan masalah Ibu Kota ditanggapi dingin. Baginya, semua akan ada solusi, selama ada kemauan kuat. Karena itu, slogannya adalah 1 jam di belakang meja, selebihnya bekerja dan bekerja.

Karakter Kepemimpinan Indonesia Masa Depan?

Joko Widodo (Jokowi) lahir di Surakarta, 21 Juni 1961 (Samita, Sornya, 2012). Menjadi Wali Kota Surakarta (Solo) selama dua periode 2005–2015. Saat pertama kali mencalonkan diri, banyak pihak yang meragukan kemampuan insinyur kehutanan lulusan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Karena, di samping penampilannya yang kurang meyakinkan, profesinya juga hanyalah pedagang furnitur rumah dan taman yang relatif jauh dari hiruk-pikuk dunia politik praktis. Namun setelah dia terpilih, lambat laun publik semakin kagum dengan terobosan-terobosan langkahnya. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perkembangan pesat. Tanpa didahului studi banding sebagaimana yang sering dilakukan anggota DPR, Joko Widodo (Jokowi) membangun kota Solo dengan mencontoh kemajuan kota-kota di Eropa.

Dengan slogan “*Solo: The Spirit of Java*”, Joko Widodo (Jokowi) mampu membersihkan taman-taman kota—dari para pedagang yang kerap mengotori dan mengalih fungsi taman—dengan tanpa gejolak yang berarti. Karena pendekatan yang dilakukannya sangat manusiawi, yakni dengan cara menyapa mereka secara langsung dan berbicara dari hati ke hati. Untuk menjual kota Solo (Surakarta) ke pentas dunia. Pada tahun 2006, Joko Widodo (Jokowi) mendaftarkan Solo menjadi anggota Organisasi Kota-Kota Warisan Dunia (Agus Pramusinto, Erwan Agus Purwanto, 2009). Dua tahun kemudian (25–28 Oktober 2008), Solo sudah menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Organisasi Kota-Kota Warisan Dunia (International Conference of World Heritage Cities) (Agus Pramusinto, Erwan Agus Purwanto, 2009).

Benteng Vestenburg yang pada pemerintahan sebelumnya terancam digusur untuk disulap menjadi pusat bisnis dan perbelanjaan, oleh Jokowi justru dijadikan tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) pada 2007. Dan pada berikutnya (2008), FMD digelar di kompleks Istana Mangkunegaran. Karena prestasi-prestasinya yang fenomenal, dalam polling majalah Tempo, Jokowi terpilih menjadi salah satu dari “*10 Tokoh 2008*”. Popularitas Jokowi kian melejit karena pembelaannya terhadap mobil ciptaan anak bangsa sendiri yakni “*Esemka-Kiat*”, yang kemudian dijadikannya sebagai mobil dinas wali kota. Padahal, mobil ini belum lulus uji emisi.

Zhong Wan Xie alias Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi calon wakil gubernur mendampingi Jokowi merupakan sosok yang unik

(Primadyastuti, Nastiti, 2012). Mengapa unik, karena Ahok pada mulanya, seperti juga Jokowi, bukan politikus. Tetapi, saat masuk dunia politik, kariernya langsung melejit. Tahun 2003 masuk Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), yang saat itu dipimpin oleh Dr. Sjahrir (alm). Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Meskipun dengan uang yang sangat terbatas, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004–2009. Baru tujuh bulan menjadi wakil rakyat, berkat prestasinya, dan atas dorongan dari berbagai kalangan, tahun 2005 Ahok maju menjadi calon Bupati Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung (Babel). Keberanian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya dengan modal uang yang terbatas, secara mengejutkan berhasil mengantongi 37,13% suara, dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005–2010. Pada tahun 2007 Ahok mencoba peruntungan maju dalam Pilkada Provinsi Bangka Belitung menghadapi Usman Saleh. Sayangnya belum berhasil karena dicurangi lawan dari berbagai segi. Tapi, pada 2009, ia berhasil menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dengan raihan suara yang signifikan, padahal sebagai orang daerah ia hanya ditempatkan di nomor urut tidak jadi. Ahok tertolong oleh keputusan MK yang menetapkan suara terbanyak yang berhak menjadi anggota legislatif terpilih. Apa yang membuat Ahok berhasil dalam politik? Kuncinya terletak pada integritas pemimpin.

Dalam kampanye menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005–2010 (Primadyastuti, Nastiti, 2012), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghindari politik uang. Caranya sederhana, ia rajin berkeliling, dan berdialog langsung dengan rakyat. Untuk menindaklanjuti dialognya, ia membagikan nomor telepon yang juga ia pakai sehari-hari. Selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, dia berhasil menunjukkan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menolak mengambil uang Surat Perjalanan Pejabat Dinas (SPPD) fiktif, dan menjadi dikenal masyarakat karena ia satu-satunya pejabat yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka, sementara yang lain lebih sering mangkir. Cara yang sama dia terapkan ketika menjadi Bupati Belitung Timur dan Anggota Komisi II DPR RI periode 2009–2014. Selama di Senayan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dikenal sebagai figur apa

adanya, vokal, dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Untuk menjaga integritasnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menetapkan standar antikorupsi, transparansi dan profesionalisme dengan cara memberi laporan secara rutin pada rakyat melalui website pribadinya, <http://ahok.org> dan twitter: @basuki_btp, yang bisa diakses kapan pun dan oleh siapa pun.

Pada tahun 2007 dikarenakan integritas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melalui Gerakan Tiga Pilar Kemitraan yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, Kamar Dagang Industri Nasional (Kadin), dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, memberikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) penghargaan sebagai tokoh anti korupsi dari unsur penyelenggara negara. Dan, Majalah Tempo pun menobatkan Ahok sebagai satu dari “10 Tokoh yang Mengubah Indonesia (2006)”. Pasangan Jokowi-Ahok adalah perpaduan antara profesionalisme, kreativitas, dan integritas. Dengan ketiga hal inilah, Jokowi maupun Ahok sudah mendulang prestasi di daerahnya masing-masing. Akankah prestasi itu bisa ditransfer ke Jakarta dengan sejuta persoalannya?

Tantangan terberat bagi Jokowi-Ahok untuk memenangkan Pilkada DKI 2012 lalu (Gatra, Sandro, 2012), adalah pragmatisme dan fanatisme sempit warga Jakarta. Warga Jakarta sudah terbiasa tergerak karena uang dan kepentingan. Dan, warga Jakarta juga sebagian masih berkuat pada masalah-masalah yang sepele yang tak ada kaitan dengan profesionalisme, yakni soal perbedaan suku, keyakinan, dan agama. Jika kedua tantangan ini bisa diatasi, kiranya akan mudah bagi Jokowi-Ahok untuk memenangkan pilkada ini.

Objektif, Sempel & Kredibel

Bekerja keras untuk mengurangi gap antara harapan dan kenyataan merupakan esensi kepemimpinan dan cara paling mujarab untuk menjaga kepercayaan publik. Sebagai pemimpin, Jokowi-Ahok mempunyai alat yang disebut kebijakan publik. Alat ini sangat kuat. Kebijakan publik yang mumpuni tidak saja sanggup mengubah fisik Jakarta, namun mampu mengubah budaya dan perilaku warga yang tinggal di dalamnya asalkan tiga syarat terpenuhi, yaitu objektif, simpel, dan kredibel.

Kebijakan harus objektif, artinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan kelompok tertentu saja. Ini merupakan esensi penting kepemimpinan publik yaitu berdiri di atas semua

golongan. Kebijakan juga harus simpel, untuk mempermudah implementasi di lapangan sekaligus mengurangi potensi salah persepsi di kalangan publik yang berujung pada resistensi. Kebijakan juga harus kredibel. Selain untuk mendapatkan impact yang sesuai harapan, hal ini juga penting guna meyakinkan para pemangku kepentingan, termasuk di antaranya politisi, pemerintah pusat, kalangan bisnis, dan masyarakat. Kredibilitas akan hadir jika kebijakan disusun berdasarkan data yang sah dan melalui perhitungan yang masak. Dalam seratus hari kepemimpinan Jokowi-Ahok, terlihat jelas bahwa umumnya pernyataan atau kebijakan mereka memenuhi dua kriteria, yaitu objektif dan simpel, yang dikomunikasikan dengan gaya yang mudah dipahami masyarakat.

Namun sangat disayangkan, cukup banyak yang belum memenuhi aspek ketiga, yaitu kredibilitas. Sebagai contoh, Kartu Jakarta Pintar termasuk kebijakan yang kurang kredibel, terutama dalam konteks penerapan good governance. Kartu Jakarta Sehat setali tiga uang. Cukup banyak kalangan menengah-atas yang menerima kartu ini. Singkatnya, kedua kebijakan berpotensi menyuburkan moral hazard yang akan terlalu membebani APBD. Rencana Jokowi tentang deep tunnel senilai Rp16 triliun serta keyakinan Jokowi bahwa investor akan mengantre begitu proyek tersebut diumumkan pada Januari 2013, perlu dijadikan catatan dan dijadikan pembelajaran. Deep tunnel ternyata sudah lama dijadikan studi dan dianggap tidak layak. Pernyataan tentang investor yang akan mengantre juga berlawanan dengan fakta di lapangan, terkait begitu sulitnya mencari investor untuk proyek infrastruktur di Indonesia.

Terlepas dari berbagai catatan di atas, Jokowi-Ahok patut diapresiasi atas berbagai terobosan dan kesungguhan yang telah ditunjukkan. Paling tidak mereka membawa angin segar dan harapan baru bagi masyarakat Jakarta. Karena Jokowi-Ahok bukan Superman yang selalu mampu mengatasi masalah, mereka perlu menerapkan strategi yang lebih matang baik dalam mewujudkan harapan masyarakat dan dalam menyusun kebijakan publik beserta implementasinya. Semoga "bulan madu" Jokowi-Ahok dan masyarakat Jakarta akan berlangsung lama syukur-syukur hingga masa jabatan berakhir.

Hal menarik di fase awal kepemimpinan Jokowi-Ahok di DKI Jakarta adalah bagaimana gebrakan mereka mewujudkan Jakarta Baru seperti mereka janjikan saat kampanye pilkada gubernur

2012 lalu (Gatra, Sandro, 2012). Tak mudah memang mengurai benang kusut persoalan Ibu Kota. Seakan-akan birokrasi kerap menjadi taman labirin di mana warga DKI Jakarta kerap bingung tidak tahu jalan keluar yang tepat. Kini, Jokowi-Ahok telah memulai perjalanan panjang dan terjal, sekaligus mengambil tantangan kerasnya atmosfer kekuasaan. Sangatlah prematur jika mengatakan Jokowi-Ahok sukses mewujudkan Jakarta Baru. Namun, beberapa indikator awal membuat lampu harapan yang lama redup dan nyaris gelap gulita mulai menyala, walaupun masih remang-remang. Sinergi gaya kepemimpinan dua sosok baru di puncak birokrasi DKI Jakarta inilah yang menghidupkan munculnya asa perubahan. Joko Widodo (Jokowi) menekankan pada kesantunan, politik harmoni, mengembangkan komunikasi interaksional, dan menjadi simbolisasi dari pemimpin rendah hati, "low profile".

Adapun gaya kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) melengkapinya dengan gaya koboi atau seperti yang sering dia sebut sendiri, yakni gaya "bad cop" dalam mengurus para birokrat di Balai Kota yang sudah lama menjadi mesin birokrasi elitis dan kerap "untouchable" dari warga DKI Jakarta sendiri. Joko Widodo (Jokowi) fokus membangun komunikasi melalui pendekatan humanistik dengan publik eksternal seperti bertemu warga kumuh di bantaran kali, penghuni rusun, pasar-pasar, terminal, juga para gubernur dari pemerintah daerah sekitar. Karakter kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) juga berbeda, dengan kesibukan berjibaku mengeluarkan jurus verbal agresif, pendekatan komunikasi transaksional, bahkan psywar dengan publik internal seperti jajaran dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ibarat permainan bola, Jokowi menjadi striker yang setiap saat harus bermanuver kreatif tetapi cantik, Ahok seperti pemain bertahan yang menjadi garda pertahanan birokrasi agar tak mudah dijebol para "penguasa kegelapan".

Tentu saja duet kepemimpinan Jokowi-Ahok bukan dewa, bukan pula superman. Mereka hanya dua manusia biasa yang dituntut bekerja dengan cara-cara yang tidak biasa. Ini pun menjadi tanggung jawab mereka berdua karena secara sadar dan sukarela mereka menerima penjelmaan diri sebagai pemimpin Ibu Kota dengan kompleksitas persoalan. Terdapat tiga level tantangan Jokowi-Ahok yang wajib mereka urai. Di level makro tantangan bagi Jokowi adalah mengubah watak sekaligus wajah

kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta yang elitis-birokratis ke teknokratis humanis. Jika para elite di Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen pada “good governance” dan “clean government”, langkah teknis beragam program dilaksanakan oleh seluruh staf Pemprov DKI dan rekanan dari pihak swasta akan bermuara pada output yang sama: kebermanfaatan birokrasi untuk warga Jakarta.

Sementara itu pada level mezo ada empat tantangan utama, yaitu: *Pertama*, Persoalan transparansi pemerintahan; *Kedua*, Pola komunikasi birokrasi dengan warga Jakarta; *Ketiga*, Pola hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintahan pusat dan pemerintah-pemerintah daerah sekitar; serta *Keempat*, Relasi hubungan dan jalinan kekuasaan antara Jokowi-Ahok dengan DPRD DKI Jakarta.

Bagaimana Mewujudkan Jakarta Baru

Bagi penulis, hal menarik di fase awal kepemimpinan Jokowi-Ahok di DKI Jakarta adalah gebrakan mereka mewujudkan Jakarta Baru seperti mereka janjikan saat kampanye pilkada beberapa waktu lalu. Tak mudah memang mengurai benang kusut persoalan Ibu Kota. Tantangan di level mikro, terkait hal-hal teknis berbagai kerja leading sector seperti transportasi publik, penanganan ketertiban umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Apakah “blusukannya” Jokowi seperti saat ini merupakan bagian dari reality show seperti dituduhkan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta? Menurut Almond dan Powell, orientasi individu terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluative. Orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya, pengetahuan seseorang mengenai sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil, symbol-symbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan seperti, ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dan lain-lain. Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seorang individu terhadap pemimpin atau sistem politik, sehingga seorang dapat menerima atau menolak sistem politik tertentu atau mengidolakan tokoh tertentu. Sedangkan Orientasi evaluative yaitu penilaian moral seseorang terhadap sistem politik atau pemimpin yang telah mereka pilih terhadap kinerja atau janji politik saat berkampanye dengan menggunakan informasi dan perasaan tentang kinerja suatu sistem politik serta penilaian didasarkan pada norma-norma yang dianut

dan sepakati bersama.

Sosok Joko Widodo (Jokowi) sang gubernur DKI Jakarta ini telah mendapatkan dan memiliki ketiga orientasi tersebut dari warga Jakarta, dengan kata lain telah merebut dan memesonakan hati para warga ibu kota. Jokowi wajar mendapatkan simpati warganya, disebabkan Joko Widodo tidak memiliki jarak dengan rakyat kecil sekalipun. Hal ini terbukti dengan kunjungan beliau ke daerah miskin dan kumuh, para warga miskin bahkan pada malam hari sekalipun, ia suka pergi meninjau lapangan untuk mengawal pembangunan untuk melihat keadaan dan pembangunan yang sedang dikerjakan para stafnya, dari pada bekerja di kantor. Sifat-sifat seperti ini sangat jarang dimiliki pemimpin di negeri Indonesia. Sosok yang sederhana, tegas, suka memecat bawahannya bila tidak mau bekerja untuk rakyat, suka humoris dan metal. Disamping itu Gubernur Joko Widodo ini tidak sekedar mengumbar janji kampanye namun langsung di laksanakan sesuai dengan skala prioritas mana kepentingan rakyat yang harus lebih dulu dilaksanakan atau dieksekusi (istilah Beliau) maka segera direalisasikan. Contoh pada saat kampanye Jokowi menjanjikan kartu Jakarta Pintar maka setelah menjabat langsung direalisasikan dengan membagikan ribuan kartu Jakarta Pintar, seperti halnya kartu ATM, untuk biaya pendidikan warga miskin di DKI. Jumlah dana pendidikan per siswa kurang mampu adalah Rp 240.000 per bulan, inipun sisa anggaran periode sebelumnya.

Apabila pemimpin itu dekat dan selalu mementingkan kepentingan rakyat, maka Insya Allah dicintai rakyatnya. Bila sudah dicintai rakyatnya maka akan tetap dirindukan untuk menjadi pemimpin rakyat tersebut untuk periode berikutnya. Maka tidak perlu berkampanye macam-macam dengan mengumbar janji sebab rakyat sudah pintar. Rakyat yang pintar berkata daripada memilih sosok yang lain yang belum tentu memperhatikan rakyat lebih baik pilih yang sudah terbukti kepemimpinannya. Sesuai pepatah “Lebih baik memilih telur di tangan daripada ayam tapi masih di awang-awang”. Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan sang Gubernur apalagi di ibukota dengan bergudang-gudang masalah mulai sampah, banjir, macet, kejahatan.

Gaya Kepemimpinan dan Integritas Joko Widodo

Kemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta September 2012 lalu merupakan hal fenomenal. Bagaimana mereka, yang notabene, merupakan pendatang, dapat menarik perhatian masyarakat Jakarta untuk memilihnya? Mereka juga mengalahkan lomba dukungan berbagai elite partai politik nasional, guyuran dana kampanye, dan sebaran distribusi isu-isu negatif. Konsep pembangunan yang mereka tawarkan jelas mengena di hati masyarakat. Namun, calon lain juga menawarkan hal yang hampir mirip. Strategi pembangunan yang berkeadilan sosial dan berprioritas pada masyarakat yang kurang berkemampuan juga dikumandangkan oleh hampir semua calon. Kelebihan Jokowi/Ahok barangkali adalah gaya dan sikap mereka dalam melakukan kampanye. Dengan sikap yang tidak dibuat-buat, Jokowi menyapa rakyat sehingga mereka merasa dimanusiakan. Keluguan dan kejujuran yang mereka tunjukkan membuat masyarakat menganggap Jokowi/Ahok sebagai bagian dari mereka.

Gaya dan sikap kampanye ini menumbuhkan solidaritas dan kepercayaan sosial terhadap janji-janji yang mereka tawarkan serta keyakinan, berdasarkan rekam jejak mereka, bahwa janji-janji itu akan dilaksanakan. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada tingkat harapan inilah kunci kemenangan Jokowi/Ahok. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada tingkat harapan itu merupakan modal sosial awal bagi Jokowi/Ahok untuk mengutip ungkapan Bung Karno, "Samen bundelling van alle nationale krachten", mempersatukan seluruh kekuatan nasional, untuk Jokowi/Ahok tentu hanya sebatas wilayah provinsi Jakarta. Modal sosial tidak saja dapat digunakan untuk "*national dan character building*" tetapi, yang lebih penting adalah membangun kekuatan ekonomi kerakyatan.

Apakah modal sosial itu betul-betul terwujud? Tergantung pada konsistensi Jokowi/Ahok dalam melaksanakan janji-janjinya pada saat kampanye. Tergantung pada gaya dan sikap Jokowi/Ahok setelah menjadi gubernur/wakil gubernur. Jika Jokowi/Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih konsisten melaksanakan janji-janji tersebut, serta mempertahankan gaya dan sikap memimpin mereka, modal sosial untuk kemajuan dan kerekatan masyarakat Jakarta akan betul-betul dapat ditegakkan. Jokowi pernah mengalami hal itu. Gemuruh masyarakat Solo untuk ikut memeriahkan kemenangannya dalam

Pilgub DKI, walau oleh karena itu mereka harus ditinggalkan) dan kemenangan 90 persen pada pemilihan wali kota periode kedua merupakan bukti telah terciptanya kepercayaan masyarakat atas kebijakan yang ia ambil.

Pengamatan kurang lebih sebulan setelah dilantik sebagai gubernur/wakil gubernur menunjukkan bahwa Jokowi/Ahok telah berusaha melaksanakan komitmen-komitmen yang dijanjikan. Tentu masih dalam tahap konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi dalam rangka perencanaan pembangunan. Jakarta juga pernah mengalami bergulirnya modal sosial ini pada zaman kepemimpinan Ali Sadikin. Modal sosial didefinisikan oleh Francis Fukuyama (2001) sebagai norma-norma informal yang secara instan dapat menumbuhkan kerja sama di antara dua atau lebih individu. Luasnya kerja sama tergantung pada lingkaran kepercayaan.

Makin luas jangkauan lingkaran kepercayaan makin besar pengaruh eksternalitas positifnya. Modal sosial juga dapat berpengaruh negatif secara eksternalitas, yaitu ketika lingkaran kepercayaan itu begitu sempit dan tidak mau bertoleransi dengan pihak-pihak di luar mereka. Rendahnya tingkat modal sosial dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau tidak efisiennya pemerintahan. Bagaimana persediaan modal sosial dapat ditingkatkan? Pertama, perlu diingat bahwa modal sosial biasanya merupakan hasil ikutan dari agama, tradisi, dan pengalaman sejarah, serta faktor-faktor lain yang berada di luar kontrol pemerintah.

Kebijakan publik yang dapat diciptakan adalah membangun lingkaran-lingkaran kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat tersebut menjadi suatu jaringan sosial yang toleran, saling percaya, dan saling merapat satu sama lain. Diperlukan relawan-relawan dari masing-masing lingkaran yang bersedia membangun jaringan sosial tersebut.

Pendidikan formal maupun informal merupakan kunci untuk pembangunan modal sosial. Pendidikan tidak saja ditujukan untuk membangun modal manusia, tetapi juga harus mencakup pembentukan norma dan nilai sosial. Pengadaan dan penyediaan barang-barang publik yang efisien dalam bentuk terjaminnya hak kepemilikan, keamanan, tegaknya hukum, kesehatan, dan infrastruktur sosial dapat secara tidak langsung meningkatkan modal sosial. Pemerintah pusat maupun daerah sedapat mungkin tidak melaksanakan kegiatan yang bilamana dijalankan

oleh sektor swasta atau masyarakat akan lebih baik hasilnya. Pendekatan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan akan lebih meningkatkan solidaritas sosial.

Dalam era demokrasi dan di tengah langkanya kepercayaan sosial, terpilihnya Jokowi/Ahok dapat menjadi model baru dalam pencalonan pemimpin daerah atau bahkan nasional. Asas integritas, kapabilitas, dan elektabilitas adalah kunci dalam seleksi calon. Integritas dan kapabilitas perlu didukung dengan rekam jejak yang memadai, terutama untuk daerah tempat pemilihan diselenggarakan. Dengan cara ini, calon dapat menciptakan modal sosial pada tingkat harapan. Pemilihan tidak hanya didasarkan atas kegiatan transaksional sesaat di mana hubungan antara pemilih dan yang dipilih hilang setelah pemilihan usai.

Rakyat memilih tidak karena harus memilih, tanpa tahu apa yang telah dilakukan calon terhadap daerah serta penduduknya. Tetapi, lebih dari semua itu, yang terpenting adalah mewujudkan modal sosial pada tingkat harapan menjadi modal sosial yang terealisasi setelah terpilih (Sinar Harapan, 21 Nop 2012). Sungguh logis pernyataan Peter Drucker yang mengatakan “tidak ada negara yang miskin di dunia ini, yang ada hanya negara yang salah kelola”. Indonesia sebagai sebuah negara tampaknya sudah salah kelola sehingga terjadi kesenjangan sosial yang amat tinggi. Indonesia, negara yang kaya sumber daya alam ini seharusnya telah mampu menciptakan masyarakat sejahtera. Tapi faktanya jutaan rakyat hidup dalam tekanan kemiskinan. Sekali lagi itu disebabkan kesalahan pengelolaan negara yang dilakukan oleh pemimpinnya. Rambu-rambu pengelolaan negara yakni konstitusi, telah dilanggar. Demokrasi yang katanya dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, hanyalah di atas kertas. Sebab kenyataan di lapangan adalah kekuasaan dipegang dan dikendalikan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat bukan lagi sebagai subjek melainkan sebagai objek dalam segala aspek kehidupan berbangsa.

Sebelum Indonesia meraih kemerdekaan dari tangan penjajah, Soekarno sangat mengkhawatirkan jika negara ini nantinya dipimpin oleh kaum ningrat, kapitalis dan borjuis. Dia berharap agar negara Indonesia merdeka dipimpin oleh rakyat “marhaen”. Pandangan itu tidak terlepas dari sikapnya yang anti feodalisme, anti imperialisme, dan anti

kolonialisme. Kekhawatiran presiden pertama Indonesia ini akhirnya terjadi juga. Banyak pemimpin hadir yang bukan berasal dari rakyat dan tidak berpihak kepada rakyat. Pemimpin yang tidak berintegritas dan tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang tunduk pada kepentingan modal. Sehingga bangsa ini dilanda krisis kepemimpinan.

Kekhawatiran Krisis Kepemimpinan Nasional

Kekhawatiran dan benih-benih krisis kepemimpinan ditandai dengan minusnya keteladanan seorang pemimpin dan tidak mau/mampu menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan. Kita malu melihat pemimpin yang sibuk melakukan pencitraan diri, tidak mau bertanggungjawab, saling melempar bola kesalahan, korup, dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Padahal seharusnya mereka memberikan teladan kepada rakyatnya.

Ketidakmauan dan ketidakmampuan mengerjakan kehendak rakyat tampak jelas dalam kebijakan-kebijakan yang tidak visioner serta terkesan asal jadi demi proyek yang menguntungkan beberapa elite. Misalnya kebijakan dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang cenderung diskriminatif terhadap rakyat miskin.

Era otonomi daerah yang diharapkan mampu menghadirkan pemimpin daerah yang memahami serta memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan rakyat tersebut, justru menghasilkan raja-raja kecil. Raja-raja kecil ini ingin menjadi besar dengan memperkaya diri melalui praktik korupsi dan mencoba melebarkan sayap kekuasaannya. Sebenarnya benih-benih krisis kepemimpinan itu sudah ada ketika dalam proses melahirkan pemimpin. Bagaimana pun juga, pemimpin yang hadir dari proses politik kotor seperti politik uang, transaksi politik ekonomi dengan kelompok tertentu, dan melalui suap, pasti akan menjadi pemimpin yang kotor juga. Sebab pemimpin tersebut nantinya akan memprioritaskan mengembalikan ongkos politik serta memuluskan kepentingan pihak penopangnya. Tentu yang dirugikan adalah rakyat.

Diyakini, ketika bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan politik, ternyata ada satu sosok yang bisa dijadikan sebagai teladan dalam memimpin sebuah daerah/kota. Dia adalah Joko Widodo, Walikota Solo. Namanya begitu populer akhir-akhir ini ketika dia tetap pada prinsipnya menjadikan Solo sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-

nilai budaya, melindungi rakyat kecil, dan melakukan reformasi birokrasi. Satu hal yang menarik adalah ketika terjadi perbedaan pandangan antara Joko dengan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, mengenai pengelolaan eks Pabrik Es Saripetojo. Dimana Joko tetap bertahan menolak pembangunan mal di lokasi tersebut. Hal itu semata-mata demi melindungi cagar budaya dan demi melindungi pedagang tradisional di sekitar daerah tersebut. Sementara Bibit Waluyo tetap ngotot mengatakan bahwa bangunan Pabrik Es Saripetojo bukan cagar budaya sehingga menurutnya bisa dibangun mal. Inilah salah satu persoalan yang hangat dibicarakan khususnya di Solo, Jawa Tengah.

Menurut penulis, guna memaksimalkan kualitas pemilihan gubernur (pilgub), maka sosialisasi program dan kampanye program pro ekonomi masyarakat merupakan langkah strategis yang mutlak perlu diintensifkan oleh para kandidat gubernur. Masyarakat wajib memperoleh akses informasi selebar-lebarnya terhadap seluruh proses. Termasuk informasi visi, misi, dan program calon sehingga masyarakat bisa objektif menilai keunggulan ataupun kelemahan calon. Muaranya, masyarakat menjatuhkan pilihan berdasarkan argumen rasional. Pembebanan tanggung jawab menyukseskan penyelenggaraan pilgub di provinsi ini tidak boleh hanya pada KPU. Pemerintah, parpol, LSM/ ormas, media massa, perguruan tinggi, ataupun kelompok masyarakat lain seyogianya dapat melakukan proses sosialisasi atau pendidikan politik.

Masyarakat, terlebih yang memiliki hak suara, sewajarnya lebih memberdayakan diri sebagai pemilih kritis dan cerdas dalam menentukan pilihan, terutama pada saat pelaksanaan. Pemilih inilah berada pada posisi kunci untuk menentukan kredibilitas calon terpilih. Aspek rasionalitas cukup signifikan memengaruhi kualitas calon terpilih.

Diperlukan sikap proaktif yang seharusnya dimiliki pemilih pada saat parpol melakukan penjangkaran kandidat. Konstituen menyampaikan masukan, atau bahkan semacam tekanan supaya parpol mengajukan calon yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kurang tepat bila semua elemen masyarakat membiarkan partai tanpa kontrol. Suka atau tidak suka, mereka harus ikut mencermati proses penjangkaran calon pada internal parpol. Sikap proaktif itu supaya tidak hanya disodori calon yang dirumuskan sebagian kecil elite. Masyarakat, khususnya yang jauh dari pusat kekuasaan, seharusnya tidak sekadar menjadi objek.

Prinsipnya mereka harus dilibatkan dan tidak boleh ditinggalkan.

Demokrasi tidak boleh dibajak oleh segelintir elite yang memperjuangkan kepentingan sempit. Pemilihan gubernur (Pilgub) adalah pesta demokrasi rakyat, sehingga seharusnya menjadi milik rakyat. Artinya, bukan elitis yang hanya diakses oleh kelompok tertentu, sementara rakyat teralienasi, ditempatkan sebagai pemilih pasif yang rentan menjadi komoditas politik. Bila sejak dini masyarakat paham dan pemerintah beserta pemangku kebijakan lainnya menghargai eksistensi mereka, niscaya pelaksanaan pilgub di provinsi ini tidak elitis, dan gubernur-wakil gubernur terpilih benar-benar hasil pilihan rasional publik, kredibel, dan memang layak memimpin daerah ini (Suara merdeka, 5 Maret 2013).

SIMPULAN

Gaya kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) memang berbeda. Dalam melindungi pedagang kecil misalnya, Joko membatasi berdirinya pusat perbelanjaan modern dan mini market. Dalam menata pasar tradisional, dia mampu merelokasi sekitar 5800 pedagang kaki lima ke 23 lokasi tanpa ada kekerasan seperti yang terjadi selama ini di banyak daerah. Caranya dengan berkomunikasi aktif dan efektif dengan pedagang kaki lima tersebut sehingga kebijakan yang dibuatnya mendapat dukungan positif dari masyarakat.

Pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) yang dulunya membutuhkan waktu berminggu-minggu serta prosedurnya berbelit-belit, kini bisa selesai dalam waktu satu jam. Itu semua karena Joko bisa mengelola pemerintahan secara efektif dan tegas. Birokrasi dirombak dan jajarannya dapat diberdayakan. Bahkan dalam pelayanan kesehatan, dibuat kebijakan dimana warganya yang miskin bisa berobat secara gratis di dua belas (12) rumah sakit pemerintah dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) se wilayah provinsi DKI Jakarta.

Joko Widodo (Jokowi) yang memimpin Solo dalam periode kedua telah membuktikan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memperjuangkan kehendak rakyat. Sehingga wajar dalam pilkada setahun lalu, Joko mendapat angka 98 persen dari rakyat. Belum ada angka sebesar itu dalam sejarah demokrasi kita. Prestasi kepemimpinan Joko Widodo juga tampak melalui survei Transparency International Indonesia (TII) pada 2010. Dari 50 kota, Solo masuk dalam tiga besar kota dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

yang baik setelah Denpasar dan Tegal. Hal ini jauh dari Kota Medan yang berada pada urutan ke-44. Tidak mengherankan lagi ketika perwakilan Kamboja dan Thailand melakukan study banding ke Solo. Artinya, Solo telah menjadi salah satu kota percontohan dimana pemimpinya mampu mengelola kota tersebut dengan bijak. Tapi anehnya, justru beberapa anggota legislatif asyik melakukan study banding ke luar negeri. Kepemimpinan Joko Widodo hendaknya menjadi pelajaran bagi kita khususnya bagi pemimpin di republik ini. Para pemimpin sudah saatnya menyadari bahwa dirinya adalah pelayan rakyat yang harus siap mengerjakan yang terbaik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat.

Kemenangan Jokowi/Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta di 2012 merupakan hal yang fenomenal. Bagaimana mereka, yang notabene, merupakan pendatang, dapat menarik perhatian masyarakat Jakarta untuk memilihnya? Mereka juga mengalahkan lomba dukungan elite partai politik, guyuran dana kampanye, dan sebaran isu-isu negatif.

Konsep pembangunan yang mereka tawarkan jelas mengena di hati masyarakat. Namun, calon lain juga menawarkan hal yang hampir mirip. Strategi pembangunan yang berkeadilan sosial dan berprioritas pada masyarakat yang kurang berkemampuan juga dikumandangkan oleh hampir semua calon. Kelebihan karakter kepemimpinan Jokowi/Ahok barangkali adalah gaya dan sikap mereka dalam berkampanye. Dengan sikap yang tidak dibuat-buat, Jokowi menyapa rakyat sehingga mereka merasa dimanusiakan. Keluguan dan kejujuran yang mereka tunjukkan membuat masyarakat menganggap Jokowi/Ahok sebagai bagian dari mereka.

Gaya dan sikap kampanye ini menumbuhkan solidaritas dan kepercayaan sosial terhadap janji-janji yang mereka tawarkan serta keyakinan, berdasarkan rekam jejak mereka, bahwa janji-janji itu akan dilaksanakan. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada tingkat harapan inilah kunci kemenangan Jokowi/Ahok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albrow, Martin, 1996, *Birokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Dwiyanto, Agus (Ed), 2005, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haris, Syamsuddin, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: LIPI Press.

Kaho, Josef Riwu, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Polgov Fisipol UGM.

Pramusinto, Agus, dan Purwanto, Erwan Agus (Ed), 2009, *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media bekerja sama dengan JIAN UGM dan MAP UGM.

Purbokusumo, Baiquni, Akhyat, Ibtu, 2006, *Reformasi Terpadu Pelayanan Publik: Integrated Civil Service Reform Pemerintah Provinsi DIY*, Yogyakarta: Pemprov DIY dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Website

Dinas Perizinan, 2012, *Perizinan di Kota Yogyakarta Nomor 4 Dunia*, diakses pada tanggal 28 Oktober 2012 pukul 16.15 WIB melalui <http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&id=867>.

Berita Online

Adidharta, Syaifud, 2012, *Kejamnya "DKI Jakarta" Bagi Warganya*, Kompasiana 19 September 2012, diakses dari <http://regional.kompasiana.com/2012/09/19/kejamnya-dki-jakarta-bagi-warganya/> tanggal 29 Oktober 2012.

-----, 2012, *DKI Jakarta, Permohonan Surat Keterangan Kematian dengan Birokrasi yang Ruwet*, Kompasiana 14 September 2012, diakses dari

<http://jakarta.kompasiana.com/layanan-publik/2012/09/14/dki-jakarta-permohonan-surat-keterangan-kematian-dengan-birokrasi-yang-ruwet/> tanggal 29 Oktober 2012.

Gatra, Sandro. (2012). "*Kemenangan Jokowi Pesan untuk Elit Parpol*", Kompas 20 September 2012, diakses dari http://nasional.kompas.com/read/2012/09/20/16531969/Kemenangan_Jokowi_Pesan.untuk_Elit_Parpol. tanggal 11 Maret 2013.

Manurung, Hendra. (2012). "*Sukseskan Jakarta MRT 2013*". Edisi ke-16, The President Post Indonesia, 24 Desember 2012.

Perwita, Banyu, A.A. (2013). "*Globalisasi dan Tantangan Manajemen Birokrasi Indonesia*". Edisi ke-10, The President Post Indonesia, 11 Maret 2013.

Primadyastuti, Nastiti. (2012). "Basuki Tjahaja Purnama". <http://profil.merdeka.com/indonesia/b/basuki-tjahaja-purnama/>, diakses 15 Maret 2013.

Samita, Sornya. (2012). "*Joko Widodo*". <http://profil.merdeka.com/indonesia/j/joko-widodo/>, diakses 11 Maret 2013

Santoso, Bowo dan Rahmat, Yudi, 2012, *Pelayanan Publik di Jakarta Sangat Buruk*, Sorotnews 18 Juli 2012, diakses dari <http://www.sorotnews.com/berita/view/pelayanan-publik-di-jakarta.1326.html#.UI3ODd2w80w> tanggal 29 Oktober 2012 pukul 08.07 WIB.

Suryanis, Afrilia, 2012, *Pengamat Nilai Pelayanan Publik DKI Jakarta Buruk*, Tempo 23 Oktober 2012, diakses dari <http://m.tempo.co/read/news/2012/10/23/083437452/Pengamat-Nilai-Pelayanan-Publik-DKI-Jakarta-Buruk> tanggal 29 Oktober 2012 pukul 08.09 WIB.